

LAKIN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

BPS KABUPATEN BANDUNG



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal ini merupakan dasar penyampaian Laporan Kinerja (Lakin) BPS Kabupaten Bandung. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang dituangkan dalam Rencana Strategis.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Lakin BPS Kabupaten Bandung Tahun 2017 ini disusun berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang mengacu pada Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2019.

Lakin BPS Kabupaten Bandung ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai:

1. Keberhasilan atau kegagalan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Bandung.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Lakin ini hingga selesai kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Bandung, 10 Februari 2018

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung,


Ir. Ruslan
NIP. 196201091986011001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftra Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kab. Bandung	2
1.3.1. Kedudukan	2
1.3.2. Tugas	2
1.3.3 Fungsi	3
1.3.4 Susunan Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung	3
1.5. Potensi dan Permasalahan	10
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2015-2019	12
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2016	23
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2013-2017	31
3.3. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung	31
3.4. Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung	35
3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2017	36
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum	39
4.2. Tindak Lanjut	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	41-58

Daftar Tabel Nomor dan Uraian Tabel

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Bandung menurut Kelompok Umur	5
Tabel 2	Daftar Nama KSK, Jabatan Definitif dan Jabatan Rangkapnya	7
Tabel 3	Daftar Mutasi Pegawai BPS Kabupaten Bandung Tahun 2017	8
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2015-2019	17
Tabel 5	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2017	19
Tabel 6	Kontribusi unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator....	21
Tabel 7	Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik	23
Tabel 8	Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik	27
Tabel 9	Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik	29
Tabel 10	Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan penyelenggaraan/ Pelaksanaan Birokrasi yang Akuntabel	30
Tabel 11	Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2013-2017.....	31
Tabel 12	Rincian Penghematan dan Revisi Anggaran tahun 2017	35
Tabel 13	Realisasi Anggaran dan Penghematan Anggaran Menurut Program	37
Tabel 14	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program Tahun 2017.....	37

Daftar Gambar Nomor dan Uraian

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung	4
Gambar 2 Komposisi SDM BPS Kabupaten Bandung Menurut tingkat Pendidikan Pegawai	5
Gambar 3 Persentase Pegawai menurut Kelompok Umur	6
Gambar 4 Visi dan Misi BPS Kabupaten Bandung	13
Gambar 5 Nilai Inti BPS	16
Gambar 6 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung	18
Gambar 7 Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik	25
Gambar 8 Logo PST	26
Gambar 9 Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2017	28
Gambar 10 Logo Sensus Ekonomi 2016	32
Gambar 11 Logo Susenas.....	32
Gambar 12 Pelatihan Petugas SE2016-Lanjutan : Pendataan UMK dan UMB 2017	33
Gambar 13 Pelatihan Petugas Susenas Maret	33
Gambar 14 Logo Sakernas	34

Daftar Lampiran Nomor dan Uraian Lampiran

	Halaman
Lampiran 1 Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung	26
Lampiran 2 Renstra BPS Kabupaten Bandung 2016-2019	27
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2016	29
Lampiran 4 SDM BPS Kabupaten Bandung 2016	31
Lampiran 5 Kegiatan BPS Kabupaten Bandung 2016	32
Lampiran 6 Respon Rate BPS Kabupaten Bandung 2016	36
Lampiran 7 Judul Publikasi yang Terbit Tahun 2016	39

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Tahun 2015-2019. Ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, (3) Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dan (4) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2017.

Tujuan BPS tersebut selaras dengan arah dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019, BPS mendapat mandat di bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, dengan program lintas Penguatan Data dan Informasi Pembangunan Keluarga Kecil Berencana. Kegiatan prioritas Nasional BPS untuk mendukung RPJMN 2015-2019 adalah (1) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan (2) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Pada setiap awal tahun BPS Kabupaten Bandung menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring dalam bentuk laporan kinerja tahunan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Bandung atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama tahun 2016.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung merupakan lembaga non departemen yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

1.3.1 Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;

- (1). BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Propinsi.
- (2). BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala

1.3.2. Tugas

BPS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.3. Fungsi

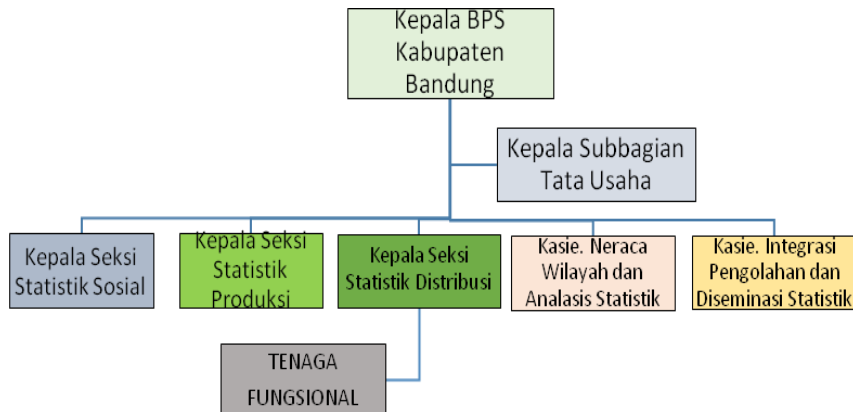
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabupaten Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS kabupaten.

1.3.4. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, yaitu :

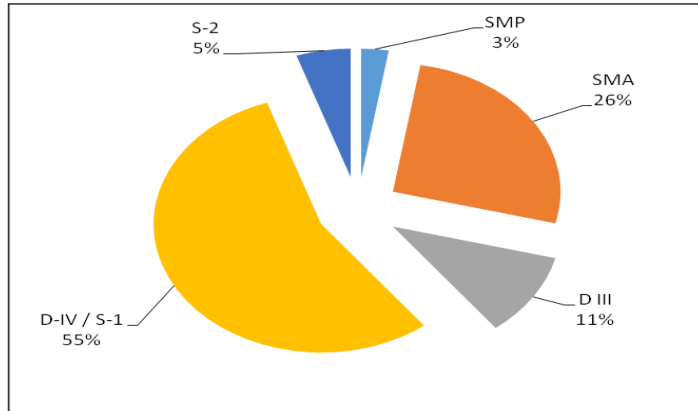
- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Statistik Sosial;
- d. Kepala Seksi Statistik Produksi;
- e. Kepala Seksi Statistik Distribusi;
- f. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
- g. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1
Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung

Pada akhir Tahun 2017, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung sebanyak 38 orang pegawai organik yang terdiri dari 1 orang pejabat Struktural Eselon III, 6 orang pejabat Struktural Eselon IV, 12 orang staf dan 19 orang Koordinator Statistik Kecamatan, ditambah dengan 4 orang pegawai Honorer. Kualitas suatu SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Sebanyak 2 orang pegawai (5%) berlatar belakang pendidikan magister (S-2), 21 orang pegawai (55%) dengan tingkat pendidikan sarjana (S-1), 3 orang pegawai (7%) dengan tingkat pendidikan diploma-3 (D-III), 10 orang pegawai (26%) berpendidikan SMA, dan hanya sebesar 3% atau 1 orang pegawai yang berlatar belakang SMP.. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Bandung cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Bandung. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



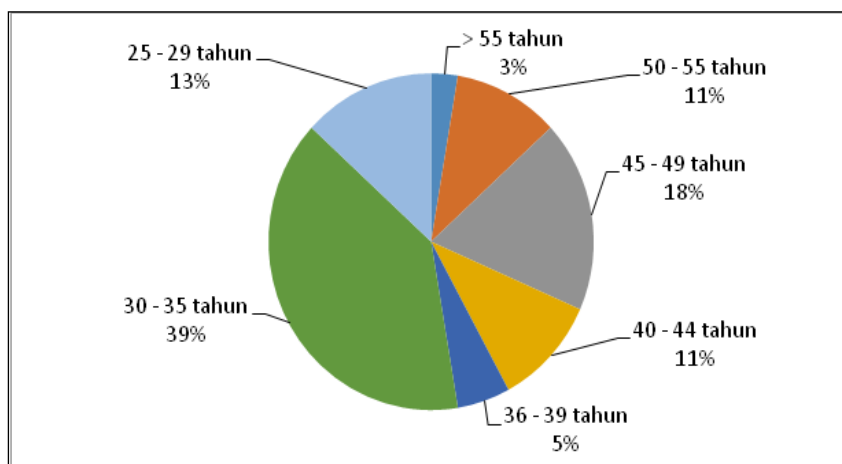
Gambar 2
Komposisi SDM BPS Kabupaten Bandung
Menurut tingkat Pendidikan Pegawai

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, jumlah pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung terbanyak berada pada kelompok umur 30-35 tahun yaitu sebanyak 15 Orang pegawai atau sebesar 39% dari total pegawai. Kemudian diikuti oleh kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 7 orang Pegawai (18%) dan 5 orang pegawai (13%) pada kelompok Umur 25-29. Sisanya tersebar di berbagai kelompok umur, yaitu kelompok umur 40-44 tahun yang sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 11% dari 4 orang pegawai (11%) pada kelompok Umur 50-55 tahun, 2 orang pegawai (5%) pada kelompok umur 36-39 tahun, dan 1 orang pegawai (3%) pada kelompok umur 55 tahun keatas.

Tabel 1
Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Bandung menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (orang)
(1)	(2)	(3)
1	> 55	1
2	50 - 55	4
3	45 - 49	7
4	40 - 44	4
5	36 - 39	2
6	30 - 35	15
7	25 - 29	5

Secara keseluruhan sebagian besar pegawai BPS Kabupaten Bandung berada pada kelompok umur di bawah 50 tahun yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 87 %. Hal ini menjadi potensi SDM yang menggembirakan dalam rangka mendorong kinerja satker BPS Kabupaten Bandung.



Gambar 3
Persentase Pegawai menurut Kelompok Umur

Pada akhir tahun 2017 jumlah tenaga lapangan yaitu Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah KSK pada awal tahun 2017. Pada awal tahun 2017 jumlah KSK tercatat sebanyak 24 orang, sedangkan awal tahun 2018 terdapat 19 orang KSK. Penurunan jumlah KSK ini disebabkan karena adanya KSK yang pensiun sebanyak 4 orang, 1 orang promosi menjadi Kepala Seksi Statistik Distribusi Kota Cirebon dan 1 orang mengikuti Tugas Belajar S-2 di Institut Teknologi Bandung. Selain itu pada tahun 2017 BPS Kabupaten Bandung mendapatkan 1 orang KSK pindahan dari BPS Kabupaten Garut. Jika dibandingkan dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 31 Kecamatan, maka jumlah Kecamatan yang kosong atau belum terisi petugas KSKnya sebanyak 12 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Rancabali, Cimaung, Kertasari, Pacet, Cikancung, Nagreg, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, Soreang, Cilengkrang dan Cimenyan.

Dalam rangka mengantisipasi berkurangnya tenaga lapangan di tingkat kecamatan, maka beberapa petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) definitif yang ada ditunjuk sebagai petugas pelaksana pada Kecamatan-kecamatan yang kosong tersebut dengan nama-nama petugas dan kecamatan rangkapnya seperti pada tabel berikut.

Tabel 2
Daftar Nama KSK, Jabatan Definitif dan Jabatan Rangkapnya

No	Nama	NIP	Gol.	Jabatan definitif	Jabatan rangkap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Yoyo	19641212 198503 1 003	III/d	KSK Rancaekek	KSK Cikancung
2	Husen Rachmat	19690805 199102 1 001	III/b	KSK Ibum	KSK Pacet
3	Ikin Sodikin	19730812 199403 1 004	III/c	KSK Pangalengan	KSK Cimaung
4	Cucu Hamzah Kurniadi, SAP	19690317 199403 1 002	III/b	KSK Cileunyi	KSK Cilengkrang dan Cimenyan
5	Hendra, S.Si	19861003 201003 1 002	III/b	KSK Ciwidey	KSK Rancabali
6	Irwan Nurdiansyah Z,A.Md	19861122 201003 1 002	II/d	KSK Cicalengka	KSK Nagreg
7	Koko Anggi Purnomo, S.Si	19850515 201212 1 001	III/a	KSK Pasirjambu	KSK Majalaya
8	Ranny Rachmaniar, S.Si	19890327 201212 2 002	III/a	KSK Baleendah	KSK Solokan Jeruk
9	Syifa Insani, S.Si	19881203 201101 2 010	III/b	KSK Banjaran	KSK Cangkuang

Selain petugas lapangan atau Koordinator statistik Kecamatan, pada tahun 2018 jumlah staf pelaksana di kantor BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2017 mengalami penurunan juga. Pada tahun 2017 jumlah staf tercatat sebanyak 14 orang sedangkan

tahun 2018 sebanyak 12 orang. Hal ini disebabkan karena terjadinya perpindahan/mutasi pegawai staf sebanyak 3 orang, dengan rincian 1 orang staf seksi statistik sosial pindah ke BPS Provinsi Jawa Barat dan 1 orang staf seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik pindah ke BPS Kota Sukabumi dan 1 orang staf seksi Statistik Distribusi menjadi Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Bandung. Selain itu pada tahun 2017 BPS Kabupaten Bandung menerima pegawai staf pindahan dari BPS Kabupaten Karawang.

Pada tahun 2017 banyak terjadi proses mutasi pada KSK, Staf dan Struktural di BPS Kabupaten Bandung, baik mutasi pindah dalam satker/antar satker, maupun promosi jabatan dan pangkat/golongan. Rincian para pegawai yang mengalami mutasi secara lengkap seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.
Daftar Mutasi Pegawai BPS Kabupaten Bandung Tahun 2017

No	Nama	Jabatan/ Pangkat Lama	Jabatan/ Pangkat Baru	TMT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ikin Sodikin	Statistisi Pelaksana Lanjutan	Statistisi Penyelia	01/02/2017
2	Ikin Sodikin	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	01/04/2017
3	Ririen Ritmamella Wuri Santani	Staf Subbagian Tata Usaha BPS Kab. Bandung	Staf Seksi Statistik Sosial BPS Kab. Bandung	14/02/2017
4	Tanshori, SAP	Staf Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kab. Bandung	Kepala Subbagian Tata Usaha BPS Kota Sukabumi	08/05/2017
5	H. Nevi Hendri, S.Si, MM	Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kab. Bandung	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kab. Cianjur	08/05/2017

No	Nama	Jabatan/ Pangkat Lama	Jabatan/ Pangkat Baru	TMT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Ria Yunita Emkaen, S.Si, M.E.	Staf Seksi Statistik Distribusi BPS Kab. Bandung	Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kab. Bandung	08/05/2017
7	Wawan Rusmana, SAP	KSK Banjaran	Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kota Cirebon	08/05/2017
8	Chandra Dewi Mirawanti	Staf Seksi Statistik Sosial BPS Kab. Bandung	Staf Subbagian Pengadaan BPS Provinsi Jawa Barat	01/06/2017
9	Ujang Suman	KSK Pacet	Pensiun	01/07/2017
10	I t a	KSK Kertasari	Pensiun	01/08/2017
11	Heri Susanto, S.Si	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01/10/2017
12	Listya Putri, A.Md	KSK Bojong Soang	Staf Seksi IPDS	01/10/2017
13	Bambang Ismail	Staf Seksi IPDS	KSK Bojong Soang	01/10/2017
14	Nandang Kusnadi	KSK Majalaya	Pensiun	01/11/2017
15	Adisty Septiyani, S.Si	Staf Seksi IPDS	Staf Seksi Statistik Nerwilis	03/11/2017
16	Ayi Ruskandar	Staf Seksi Statistik Distribusi	Staf Seksi IPDS	03/11/2017
17	Rasmana Bin Suwita	KSK Cimenyan	Pensiun	01/12/2017
18	Cucu Rahmat Slamet, ST	Staf Seksi Statisitik Produksi BPS Kab. Karawang	Staf Seksi Statistik Sosial BPS Kab. Bandung	01/07/2017
19	Syifa Insani, S.Si	KSK Cigedug BPS Kab. Garut	KSK Banjaran BPS Kab. Bandung	01/07/2017
20	Nurdianto Zaenuridin, S.Si	KSK Baleendah BPS Kab. Bandung	Tugas Belajar S-2 ITB/Staf TU BPS Kab. Bandung	01/08/2017
21	Ranny Rachmaniar, S.Si	KSK Solokan Jeruk BPS Kab. Bandung	KSK Baleendah BPS Kab. Bandung	03/11/2017

1.5. Potensi dan Permasalahan

BPS Kabupaten Bandung merupakan *National Statistics Office (NSO)* yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS Kabupaten Bandung telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS Kabupaten Bandung untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peranan data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS Kabupaten Bandung untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS Kabupaten Bandung.

Disisi lain, responden enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung. Selain itu, luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan perstatistikan di BPS Kabupaten Bandung. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Data BPS Kabupaten Bandung telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi. BPS Kabupaten Bandung juga gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal BPS Kabupaten Bandung. Harapannya ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS Kabupaten Bandung lebih kooperatif dalam memberikan jawaban apa adanya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Bandung; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Bandung, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Bandung; serta sistematika penyajian laporan.

- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2017.

- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2017, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung 2017, Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung 2017, dan Realisasi Anggaran tahun 2017

- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan saran tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2016-2019 adalah **“terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. BPS Kabupaten Bandung turut berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik. Visi yang disusun BPS Kabupaten Bandung untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:



“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Kabupaten Bandung sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. **“Data statistik yang terpercaya”** yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. **“Untuk semua”** dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS Kabupaten Bandung sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.



Gambar 4
Visi dan Misi BPS Kabupaten Bandung

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*.

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam

memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kabupaten Bandung akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ...

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... pembinaan dan koordinasi ...

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS Kabupaten Bandung juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

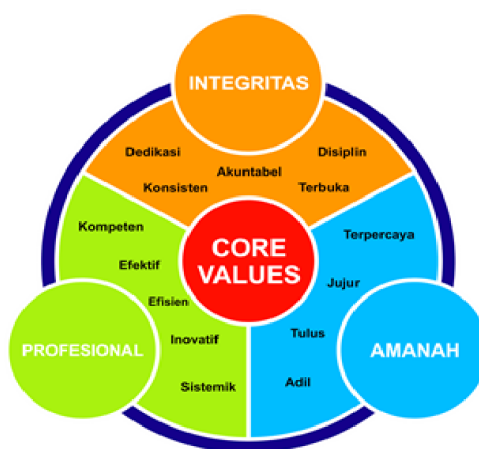
1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
2. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
5. Pengembangan sistem informasi statistik;
6. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik”.

Membangun insan statistik ...



Gambar 5
Nilai Inti BPS

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni **profesional, berintegritas dan amanah**”.

... yang Profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... berIntegritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...Amanah...

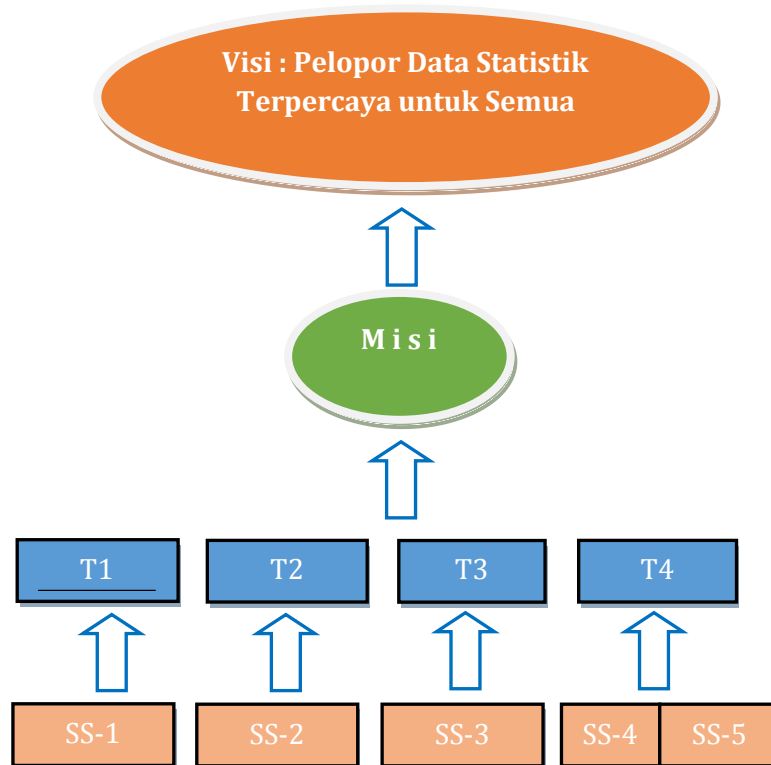
“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2016-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2015-2019

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
(1)		(2)	
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS3.	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4.	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	
	SS5.	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
BPS Kabupaten Bandung

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2017

Pada setiap awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2017

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85
1.1. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	75
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	0
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi/Laporan	88
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei		
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan rumah tangga	Persen	93.93
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan usaha	Persen	99.21
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	99.82
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	85
2.1. Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	15.000
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
3.1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
	Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	0
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	73
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Bandung atas penggunaan anggaran BPS. Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat Eselon IV (kepala seksi dan kepala subbagian). Karena itu untuk setiap seksi dan subbagian mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja BPS Kabupaten Bandung. Peranan unit kerja Eselon IV pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Kontribusi unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwiis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic		*	*	*	*	*
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic		*	*	*	*	*
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		*	*	*	*	*
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS						*
	Jumlah Release Data yang tepat waktu		*	*	*	*	*
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu		*	*	*	*	*
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei						
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan rumah tangga		*	*	*	*	*
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan usaha			*	*	*	*
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan rumah tangga non usaha		*	*	*	*	*
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS						*
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS						*
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS		*	*	*	*	*
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional						*

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwilis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun						*
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistic sektoral dan khusus yang dihimpun						*
1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	*					
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	*					
	Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	*					
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	*					
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	*					

Keterangan : :Penanggungjawab * : Kontributor

Keberhasilan pencapaian target kinerja sangat didukung oleh anggaran yang diberikan untuk satker BPS Kabupaten Bandung. Bentuk dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program kegiatan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA)
3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2017

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung 2017 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2017. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK (Perjanjian Kinerja) tahun 2017 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “Peningkatan kualitas data statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai melalui sasaran strategis, meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 7.
Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik

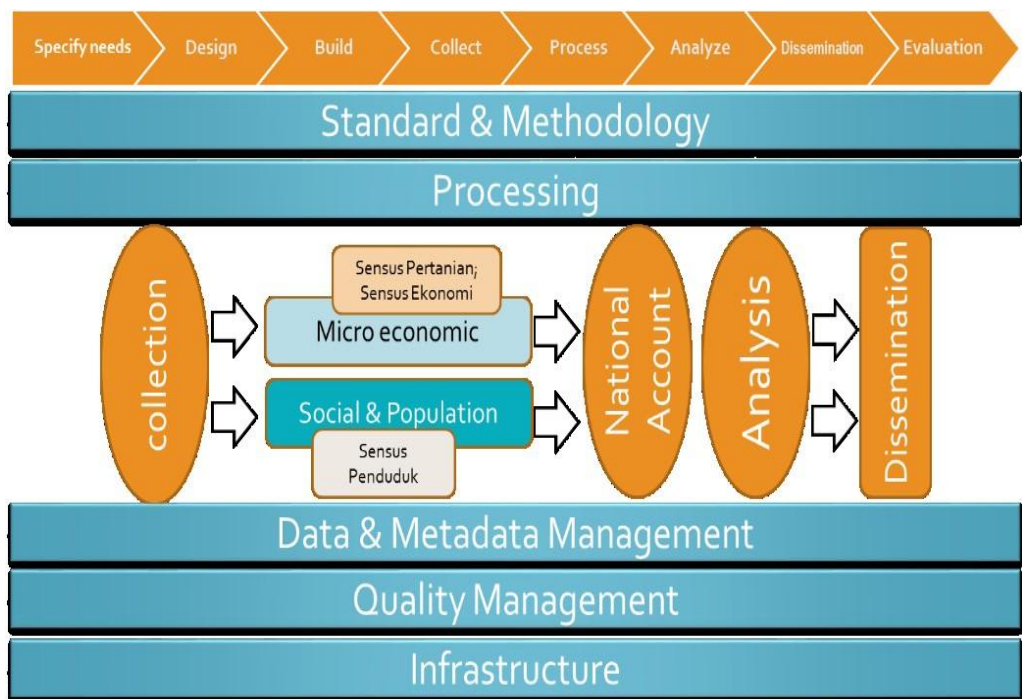
Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan kualitas data statistik				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85	94	110.59
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85	94	110.59
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	75	67	89.33
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	100	100
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Laporan/ publikasi	88	88	100
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	93.93	100.12	106.59
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	Persen	99.21	98.11	98.89
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	99.82	78.06	78.20
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				97.66

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 110,59 persen dengan Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 97,66 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat capaian sudah di atas 100 persen namun jika dilihat dari masing-masing indikator, masih terdapat indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) Indikator ‘Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama’ capaian kinerja sebesar 89.33 persen (2) indikator “Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha” capaian kinerjanya sebesar 98,79 persen dan (3) indikator “Persentase pemasukan

dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha” capaian kinerjanya sebesar 78,20 persen.

Meskipun capaian tujuan pertama telah relatif tinggi, namun upaya peningkatan kualitas data statistik harus terus dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung. Upaya peningkatan kualitas data di BPS, selain melalui pendekatan dengan seluruh *stakeholder* dan responden sebagai object survei yang terus menerus, saat ini usaha lain yang sedang dan terus dilakukan BPS adalah melalui pembenahan tata laksana (*bussiness process reengineering*) dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk berbagai kegiatan survei dengan tujuan membentuk Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik yang lebih terintegrasi. Rancangan dari Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik 2016-2019 (*Statistical Business Framework and Architecture – SBFA*) dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 7.
Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik

Kebutuhan untuk memproduksi Statistik Neraca Nasional menjadi prioritas dalam kerangka pembenahan proses bisnis survei-survei yang ada di BPS. Kerangka pembenahan juga memperhatikan kerangka kebutuhan infrastruktur statistik korporat untuk mendukung semua proses yang diidentifikasi di dalam model. Di dalam SBFA ini dituangkan semua kebutuhan perubahan bisnis yang diperlukan, kerangka infrastruktur statistik, manajemen data dan metadata, kebutuhan sistem-sistem yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang dibangun, kebutuhan penyelarasan organisasi agar mendukung perubahan proses bisnis yang terjadi dan kebutuhan kompetensi SDM untuk menjamin perubahan bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai BPS sesuai yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua diwujudkan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Moto yang diterapkan dalam PST adalah melayani dengan hati. BPS meraih predikat patuh terhadap UU Pelayanan Publik. Menurut Ombudsman pelayanan publik BPS telah berada pada zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi.

Tujuan kedua adalah “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*User Engagement*). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.



Gambar 8
Logo PST

Tabel 8.
Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima
Hasil Kegiatan Statistik

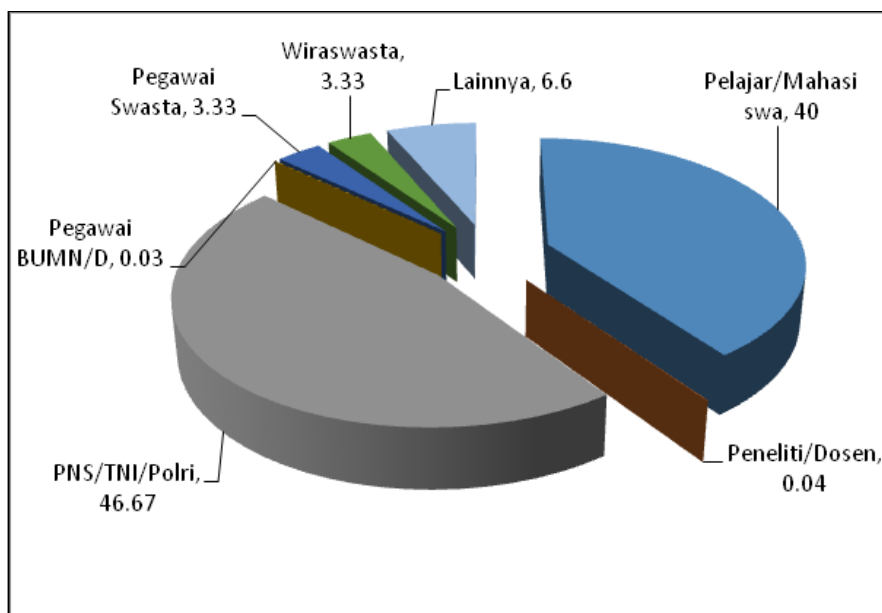
Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	85	88	103.53
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	15.000	23.050	153.73
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85	86	119.03
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75	38.89	51.85
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				102.23

Berdasarkan tabel 8 di atas, tujuan kedua dapat tercapai dengan tingkat capaian diatas 100 persen atau sebesar 103,53 persen dan secara keseluruhan Indikator Sasaran memiliki nilai capaian di atas nilai 100 persen dengan nilai rata rata Capaian Indikator sasaran sebesar 102,23 persen.

Namun demikian penetapan target indikator sasaran yang relatif baru yaitu “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional” sebesar 75 % tampaknya masih relatif terlalu tinggi, sehingga masih harus dikaji ulang, karena hasil capaian indikator tersebut relatif sangat rendah, yaitu sebesar 51,85 %.

Review target perlu dilakukan, mengingat bahwa nilai tersebut di dapat dari hasil Survei Kepuasan Data (SKD) tahun 2017 dan jika melihat dari komposisi persentase responden survei tersebut berdasarkan pekerjaan responden lebih didominasi oleh mahasiswa/pelajar, swasta, BUMN, dan pekerja lainnya sebesar 53.29 persen. Sementara responden yang biasanya menggunakan data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional, yaitu PNS/TNI/POLRI dan Dosen/Peneliti hanya 46.71 persen.

Selain itu dari responden PNS/TNI/POLRI dan Dosen/Peneliti yang mengakses data BPS, belum tentu semuanya mengakses data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.



Gambar 9
Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2017

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang Statistik dengan sasaran strategis meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya

manusia BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat tercapai dengan baik sebesar 100 persen seperti yang dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1 Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10	10	100
3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10	10	100
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				100

Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dan (2) Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10
Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan
birokrasi yang akuntabel

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel)				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60	59	98.33
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	60	59	98.33
Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	satker	0	0	0
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS				
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	73	81	110.96
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100	100	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103.10

Berdasarkan tabel 10 di atas, Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan keempat adalah sebesar 103,10 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga belum dapat tercapai dengan baik dan masih diperlukan usaha peningkatan yang lebih baik lagi.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2013-2017

Pada tahun 2017 rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis masing-masing adalah sebesar 103,11 persen dan 100,75 persen. Perkembangan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2013-2017

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata Strategis	Capaian Kinerja Sasaran	95,25	95,34	95,26	95.40	100,75

Berdasarkan tabel 11 di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran strategis, cukup menggembirakan karena menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2013 dan 2015 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,35 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun capaian kinerja mengalami *trend* /kecenderungan kenaikan yang positif, namun BPS Kabupaten Bandung harus terus berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, terutama upaya peningkatan pada indikator-indikator sasaran yang masih memiliki nilai relatif masih rendah.

3.3. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung

Banyak kegiatan-kegiatan survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung selama tahun 2017, beberapa Kegiatan prioritas BPS pada tahun 2017 diantaranya adalah: (1) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan: Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 (2) Survei Sosial Ekonomi Nasional (3) Survei Angkatan Kerja Nasional.

Gambar 10
Logo Sensus Ekonomi 2016

Tahun 2016 Sensus Ekonomi dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI. Mencakup semua aktivitas ekonomi (kecuali sektor pertanian) dan semua skala ekonomi usaha. Sensus Ekonomi (SE) dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, dengan tahun berakhir angka 6. SE2016 adalah SE yang ke-4 (1986, 1996, dan 2006).

SE2016 bertujuan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Juga untuk menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur sektor ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha. Kegiatan SE2016 pada tahun 2017 merupakan sensus lanjutan dengan melaksanakan pencacahan sampel pada perusahaan-perusahaan yang telah di-*Listing* atau terdaftar pada kegiatan tahun 2016, yang meliputi perusahaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB).



Gambar 11
Pelatihan Petugas SE2016-Lanjutan :
Pendataan UMK dan UMB 2017

Kegiatan SE2016 Lanjutan: Pendataan UMK dan UMB Tahun 2017 Kabupaten Bandung diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, pada 31 kecamatan dengan jumlah sampel 20.557 usaha/perusahaan terdiri dari 3.707 UMB dan 16.850 UMK mencakup seluruh unit usaha/perusahaan, baik yang menggunakan bangunan tetap maupun tidak tetap dan yang tidak di dalam bangunan

(keliling). Sedangkan aktivitas ekonominya mencakup seluruh kategori/lapangan usaha, kecuali aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan (kategori A) serta aktivitas administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (kategori O).

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin setiap tahun adalah Survei



Gambar 12.
Logo Susenas

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas menghasilkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Data dan indikator dari Susenas telah dipergunakan secara luas dan dipandang sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan, monitoring,

dan evaluasi program pembangunan pemerintah.

Susenas telah dilaksanakan lebih dari lima dasa warsa, dimana Susenas pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1963, dengan fokus pada pengumpulan data konsumsi/ pengeluaran rumah tangga. Dari waktu ke waktu cakupan materi Susenas semakin banyak dan beragam, sehingga memerlukan pengaturan siklus (periode) waktu pengumpulan

datanya. Dengan perannya yang semakin penting sebagai sumber data bidang sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat, maka pada Tahun 1992 BPS melakukan pengembangan materi Susenas sekaligus penataan waktu pendataannya. Karena memang cakupannya luas, maka Susenas merupakan “*Mother of Survey*”, hal ini digambarkan dengan 3 dari 4 target pembangunan nasional berasal dari data Susenas. Target pembangunan nasional yang dapat digambarkan dari data Susenas antara lain data terkait angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Ketimpangan pendapatan (*gini ratio*).

Selain sebagai salah satu sumber data penting untuk perencanaan dan evaluasi Program Pembangunan nasional (Propenas) dan program sektoral (Kementerian/Lembaga), Susenas juga menjadi sumber data utama untuk penyediaan indikator *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Sustain Sustainable Development Goals* (SDGs), RPJMN dan Nawacita.



Gambar 13.
Pelatihan Petugas Susenas Maret

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)



Gambar 14
Logo Sakernas

Salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS secara rutin setiap tahun adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas menghasilkan data yang berkaitan dengan kondisi dan profil ketenagakerjaan yang ada di masyarakat meliputi Penduduk Usia Kerja (PUK), Pengangguran, dan informasi pekerja. Data dan indikator dari Sakernas telah dipergunakan secara luas dan dipandang

sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pemerintah.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians (ICLS)* ke-13 tahun 1982. Pada tahun 2013, *International Labour Organization (ILO)* menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (yang dalam ICLS ke-19 disebut dengan Work) dengan batasan produksi yang mengacu pada *System Nation Account (SNA)* 2008.

Mulai tahun 2016, kuesioner Sakernas sudah mengadopsi 2 konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun konsep ICLS ke-19 belum diakomodir secara utuh. Pada Sakernas 2017 dilakukan penyempurnaan kembali konsep ICLS ke-19 mencakup penyempurnaan alur pertanyaan dan penambahan beberapa pertanyaan dalam kuesioner.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas Agustus 2017 adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya serta perkembangan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

3.4. Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung 2017

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung selama tahun 2017 diantaranya adalah penghematan sumber daya energi dan penganggaran. Dari sisi sumber daya energi, BPS Kabupaten Bandung berupaya untuk hemat energi listrik dan air.

Dari sisi penganggaran, pada tahun 2017 telah terjadi penghematan anggaran di BPS Kabupaten Bandung, yang dapat dilihat dari perubahan PAGU Anggaran. PAGU awal tahun sebesar Rp. 9.718.905.000,- berubah menjadi PAGU akhir tahun sebesar Rp. 9.065.832.000,- sehingga telah terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 653.073.000,-. Selain penghematan anggaran untuk dialihkan menjadi kegiatan pada satker lain, upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran juga dilakukan dengan cara pengalihan/pergeseran anggaran, baik antar rincian, komponen atau keluaran (*output*) kegiatan satker. Adapun perubahan dan pergeseran anggaran tersebut dilaksanakan melalui beberapa kali Revisi DIPA dengan rincian revisi tersebut sebagai berikut.

Tabel 12.
Rincian Penghematan dan Revisi Anggaran tahun 2017

Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)	Kewenangan	Keterangan Revisi
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	5 April 2017	Revisi DIPA dalam rangka Perubahan Kegiatan Program PPIIS Tahun 2017	9.718.905.000	9.167.527.000	-551.378.000	DJA	Revisi Akibat Perubahan Dasar Hitung Kegiatan SE2016 Lanjutan, SOUT, dll Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-042/BPS/2000 /02/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Revisi DIPA TA 2017
02	10 Juli 2017	Revisi Antar Satker dalam rangka Perubahan Sampel SOUT dan RPH	9.167.527.000	9.177.075.000	9.548.000	DJPB	Revisi Antar Satker dalam rangka Perubahan Sampel SOUT dan RPH Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-059A/BPS/2000 /04/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Perubahan Rate Pengolahan SOUT
03	16 Agustus 2017	Revisi APBN-P	9.177.075.000	9.065.832.000	-111.243.000	DJA	Revisi dalam rangka Penghematan Anggaran (APBN-P 2017) Berdasarkan Surat dari Kepala BPS No : B-078/BPS/1000/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 dan surat Sekretaris Utama BPS Nomor : B-166/BPS/2000/07/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Penghematan Anggaran
04	23 Oktober 2017	Revisi POK	9.065.832.000	9.065.832.000	0	DJPB	Revisi Rincian Kegiatan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik, SE2016 Lanjutan, NTP 2017 dan Kegiatan Rutin Lainnya
05	11 November 2017	Revisi POK	9.065.832.000	9.065.832.000	0	DJPB	Revisi Rincian Kegiatan Sakernas, Susenas, SE2016 Lanjutan dan Kegiatan Rutin Lainnya

Hasil pengukuran yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap satker BPS Kabupaten Bandung melalui Sistem Aplikasi SMART terhadap rata-rata efisiensi untuk setiap jenis output memberikan nilai sebesar 10,15 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi terhadap tercapainya target output bila dibandingkan dengan realisasi anggaran.

3.5. Kinerja Anggaran Tahun 2017.

Pagu yang diberikan kepada satker BPS Kabupaten Bandung untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp. 9.065.832.000. Nilai tersebut terjadi penurunan Pagu Anggaran sebesar 77.44 persen dibandingkan tahun anggaran 2016 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 40.205.833.000. Pagu anggaran tersebut, terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada Tabel 12.

Berdasarkan Tabel 12, Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah sebesar 89.90 persen dari total pagu, dengan rincian realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 89,61 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 89,04 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 90.33 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PSPA paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program PPIS paling besar diantara program yang lainnya.

Tabel 13
Realisasi Anggaran dan Penghematan Anggaran Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Penghematan Pagu (Rp)	Persentase penghematan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.337.999.000	4.783.152.359	89.61	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	41.400.000	36.863.865	89.04	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	3.686.433.000	3.329.903.910	90.33	653.073.000	19.61
Total	9.065.832.000	8.149.920.134	89.90	653.073.000	8.01

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran 2017 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program Tahun 2017

Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	113,6	89.61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	100,00	89.04
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	101,14	90.33
Nilai Rata-rata	104,91	89,66

Berdasarkan tabel di atas, seluruh program memiliki capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya. Secara rata-rata capaian kinerja program sebesar 104,91 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata rata penyerapan anggaran yaitu sebesar 89,66 persen. Selain nilai persentase penyerapan anggaran di atas, berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap satker BPS Kabupaten Bandung melalui Sistem Aplikasi SMART diperoleh nilai kinerja sebesar 90,42 persen (*predikat: sangat memuaskan*), dengan rincian hasil kinerja yang dinilai adalah sebagai berikut : rata-rata efisiensi anggaran untuk setiap jenis output sebesar 10,15 persen, capaian konsistensi penyerapan anggaran atas RPD (Rencana Penarikan Dana) 91,55 persen, konsistensi penyerapan anggaran atas RPD revisi 91,47 persen dan capaian keluaran sebesar 100 persen . Hal ini menunjukkan bahwa BPS Kabupaten Bandung dapat menggunakan anggaran secara efektif dan berhasil melakukan efisiensi penganggaran dalam mencapai target kinerja tahun 2017 sesuai tujuan dari sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Terdapat 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2017, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, (3) Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dan (4) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung tahun 2017 relatif dapat dianggap tercapai, yang dicerminkan oleh nilai capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang relatif tinggi. Meskipun perkembangan capaian kinerja mengalami *trend* /kecenderungan kenaikan yang positif, namun BPS Kabupaten Bandung harus terus berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, terutama upaya peningkatan pada indikator-indikator sasaran yang masih memiliki nilai relatif masih rendah.

Dalam hal perbandingan antara capaian kinerja program dengan penyerapan anggaran, rata-rata persentase Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung (104,91 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan Penyerapan Anggaran (89,66 persen), yang berarti tujuan efektifitas dan efisiensi sistem penganggaran berbasis kinerja telah dapat tercapai dengan baik.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:

- (1) Perlu usaha pendekatan dan sosialisasi yang lebih lagi dalam rangka meningkatkan *respon rate*, khususnya untuk responden non rumah tangga non usaha untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator "Persentase pemasukan dokumen dengan pendekatan non rumah tangga non usaha".

- (2) Melakukan *review*/peninjauan nilai target pada indikator sasaran, yaitu “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional” dan “Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama” dan indikator disesuaikan dengan hasil evaluasi nilai realisasi pada tahun 2017.
- (3) Melakukan penajaman (peningkatan) target kinerja pada beberapa indikator sasaran yang telah memiliki capaian kinerja jauh di atas 100 persen. Penajaman target kinerja ini disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi nilai realisasi pada tahun 2017. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja jauh lebih baik lagi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Renstra BPS Kabupaten Bandung 2015-2019

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%
1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%	80%	82%	82%	82%
1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%
1.4. Jumlah Publikasi /laporan yang tepat waktu	47%	47%	47%	47%	47%
1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	7	7	7	7	7
SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)					
2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%
2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	73%	73%	74%	74%	75%
2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)					
3.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%
3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	600	615	630	650	675
3.3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	70%	72%	74%	75%	75%
3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	70%	70%	73%	73%	75%
SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS					
4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	70%	70%	73%	73%	74%
4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	70%	70%	73%	75%	80%
SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	69	70	72	73

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. R. Basworo Wahyu Utomo
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Bandung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Dody Herlando, M.Econ
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. Dody Herlando, M.Econ
NIP. 19640726 198601 1 001

Soreang, 20 Januari 2017

Pihak Pertama

Ir. R. Basworo Wahyu Utomo
NIP.19620405 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BPS KABUPATEN BANDUNG

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85	
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85	
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	75	
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	88	
	Jumlah Publikasi / Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1	
	Persentase pemasukan dokumen <i>(response rate)</i> survei	Persen	93.93	
	- Persentase pemasukan dokumen <i>(response rate)</i> survey dengan pendekatan rumah tangga			Persen
- Persentase pemasukan dokumen <i>(response rate)</i> survey dengan pendekatan usaha	Persen			99.82
- Persentase pemasukan dokumen <i>(response rate)</i> survey dengan pendekatan non rumah tangga non usaha				
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	85	
2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	15.000	
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	75
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistic sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
3.1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistic sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
4.1 Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
	Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	0
4.2 Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	73
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Rp. 5.337.999.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 41.400.000,-
3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 4.339.506.000,-

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat



Ir. Dody Herlando, M.Econ
NIP. 19640726 198601 1 001

Soreang, 20 Januari 2017
Kepala BPS Kabupaten Bandung



Ir. R. Basworo Wahyu Utomo
NIP.19620405 199003 1 001

Lampiran 3. SDM BPS Kabupaten Bandung akhir 2017

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan						Total
		SMP	SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Staf dan Struktural							
1	Kepala BPS Kabupaten				1			1
2	Subbag Tata Usaha	1	1	1	2			5
3	Seksi Statistik Sosial		1		2			3
4	Seksi Statistik Produksi		1		2			3
5	Seksi Statistik Distribusi				2			2
6	Seksi Nerwilis				1	1		2
7	Seksi IPDS		1	1	0	1		3
Sub Jumlah A		1	4	2	10	2	0	19
B	Petugas Lapangan							
1	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)		4	2	13			19
Sub Jumlah B		0	4	2	13	0	0	19
Jumlah Total		1	8	4	23	2	0	38

Lampiran 4. Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2017

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Statistik Sosial													
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	√											
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran		√						√				
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan							√					
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan								√				
5	Updating Listing Blok Sensus Survei Komuter				√								
6	Pencacahan Survei Komuter					√							
7	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) Maret 2017		√										
8	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) Maret 2017			√									
9	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) September 2017								√				
10	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) September 2017									√			
11	Survei Statistik Polkam			√	√	√	√						
12	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2017		√	√									

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Statistik Produksi													
13	Updating Direktori Industri Besar Sedang (IBS)		√	√	√	√	√	√	√	√	√		
14	Industri Besar Sedang (IBS) Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Listing										√		
16	Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan										√	√	
17	Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Listing			√									
18	Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan				√			√			√		√
19	Kerangka Sample Area (KSA)					√	√	√	√				
20	Peternakan Rumah Potong Hewan (RPH)				√			√			√		√
21	Laporan Tahunan Sapi Perah (LTS)			√	√	√	√						
22	Laporan Tahunan Ternak Kecil dan Besar (LTT)			√	√	√	√						
23	Laporan Tahunan Unggas (LTU)			√	√	√	√						
24	Survei Produktifitas Tanaman Pangan (Ubinan) Listing				√				√				√
25	Survei Produktifitas Tanaman Pangan (Ubinan) Pencacahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
26	Hortikultura			√	√	√	√						
27	Konstruksi Triwulanan				√			√			√		√
28	SP-Lahan	√											
29	SP- Benih	√											

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
30	SP- Alsin	√											
31	SP Padi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
32	SP Palawija	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
33	SPH-Lahan	√											
34	SPH- SBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
35	SPH-BST				√			√			√		√
36	SPH-TH				√			√			√		√
37	SPH-TBF				√			√			√		√
38	SPH-Benih	√											
39	Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)							√	√	√			
40	Survei Produktifitas Tanaman Pangan (Ubinan) Swakarsa									√	√	√	
Statistik Distribusi													
41	HPB / Harga Perdagangan Besar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	HPB (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)					√	√	√					√
43	SPDT - IHPB / Survei Penyempurnaan Diagram Timbang - Indeks Harga Perdagangan Besar									√	√		
44	IKK / Indeks Kemahalan Konstruksi	√			√			√			√		
45	SHPed / Harga Produsen Pedesaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
46	SHPed / Harga Konsumen Pedesaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
47	HPG / Monitoring Harga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Produsen Gabah												
48	HPBG / Harga Beras di Penggilingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
49	HPK/Harga Produsen Barang Konstruksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
50	HPS/Harga Produsen Barang Non Konstruksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	HPJ/Harga Produsen Sektor Jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
52	HPK/Harga Produsen Barang Konstruksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
53	HP (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)					√	√	√					√
54	Survei Keuangan TK II - APBD 2	√	√	√									
55	Survei Keuangan TK II - K2				√	√	√						
56	Survei Keuangan TK Desa - K3	√	√	√	√								
57	Survei Lembaga Keuangan - Koperasi								√	√	√		
58	VHT-S / Survei Tingkat Penghunian Kamar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
59	PJ II-5/Survei Panjang Jalan Raya		√	√	√								
60	AJR II-2/Survei Angkutan Jalan Raya (Bus)		√	√	√								
61	AJR II-3/Survei Angkutan Jalan Raya (Truck)		√	√	√								
62	STKU / Survei Triwulanan Kegiatan Usaha				√			√			√		√

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
63	Survei Penyusunan Direktori Pasar & Pusat Perdagangan				√	√							
64	Survei Peningkatan Kualitas Data Ekspor				√	√							
65	Survei Konsumsi Bahan Pokok (L, S, PD)	√	√	√	√	√							
66	PAW / Survei Perdagangan Antar Wilayah				√	√							
67	Poldis / Survei Pola Distribusi Perdagangan				√	√							
68	SPDT - NTP / Survei Penyempurnaan Diagram Timbang - Nilai Tukar Petani										√	√	√
69	Wisnus/Survei Wisatawan Nusantara (L, S)										√	√	
70	SE2016 - UMK UMB								√	√			
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik													
71	Penyusunan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha				√	√	√	√	√				
72	Penyusunan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Menurut Pengeluaran					√	√	√	√	√			
73	Penyusunan Statistik Daerah							√	√	√			
74	Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)											√	√
75	Penyusunan Analisis Hasil Listing SE2016											√	√

No.	Kegiatan	Pelaksanaan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
76	Survei Tendensi Konsumen (STK)			√			√			√			√
77	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)			√			√			√			√
78	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPRT)			√			√			√			√
Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik													
79	Pengolahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)			√						√			
80	Pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)				√						√		
81	Pengolahan Survei Penyusunan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT NTP)					√							
82	Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA)		√	√	√	√	√	√	√				
83	Penyusunan Kecamatan Dalam Angka (KCDA)		√	√	√	√	√	√	√	√			
84	Pemutakhiran Master File Desa (MFD)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
85	Pendataan Survei Kepuasan Data (SKD)		√	√	√	√	√	√	√				
86	Pendataan Metadata			√	√	√	√	√					
87	Pengolahan SE2016-Lanjutan (DSU, DSL dan DSP Sisip)								√	√	√	√	√

Lampiran 5. Response Rate Survei BPS Kabupaten Bandung 2017

No.	Nama Survei/Sensus	Target	Realisasi	Response Rate (%)
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	19	19	100
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	380	380	100
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	57	57	100
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan	570	570	100
5	Updating Listing Blok Sensus Survei Komuter	112	112	100
6	Pencacahan Survei Komuter	1120	1120	100
7	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017	108	108	100
8	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017	1.080	1.080	100
9	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017	27	27	100
10	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017	270	270	100
11	Survei Statistik Polkam	7	7	100
12	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2017	160	160	100
13	Updating Direktori Industri Besar Sedang (IBS)	2051	1998	97,42
14	Industri Besar Sedang (IBS) Bulanan	348	252	72,41
15	Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Listing	33	33	100,00
16	Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan	209	209	100,00
17	Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Listing	34	34	100,00
18	Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	584	578	98,97
19	Kerangka Sample Area (KSA)	416	416	100,00
20	Peternakan Rumah Potong Hewan (RPH)	60	60	100,00
21	Laporan Tahunan Sapi perah (LTS)	2	2	100,00
22	Laporan Tahunan Ternak Kecil dan Besar (LTT)	4	4	100,00
23	Laporan Tahunan Unggas (LTU)	5	5	100,00

No.	Nama Survei/Sensus	Target	Realisasi	Response Rate (%)
24	Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) listing	178	178	100,00
25	Survei Produktifitas Tanaman Pangan (Ubinan) Pencacahan	562	487	86,65
26	Hortikultura	3	3	100,00
27	Konstruksi Triwulanan	12	9	75,00
28	SP-Lahan	31	31	100,00
29	SP- Benih	31	31	100,00
30	SP- Alsin	31	31	100,00
31	SP Padi	372	372	100,00
32	SP Palawija	372	372	100,00
33	SPH-Lahan	31	31	100,00
34	SPH- SBS	372	372	100,00
35	SPH-BST	124	124	100,00
36	SPH-TH	124	124	100,00
37	SPH-TBF	124	124	100,00
38	SPH-Benih	31	31	100,00
39	LITBANG	7	7	100,00
40	Survei Produktifitas Tanaman Pangan (Ubinan) Swakarsa	2	2	100,00
41	HPB / Harga Perdagangan Besar	192	192	100,00
42	HPB (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)	16	16	100
43	SPDT - IHPB / Survei Penyempurnaan Diagram Timbang - Indeks Harga Perdagangan Besar	32	32	100
44	IKK / Indeks Kemahalan Konstruksi	4	4	100,00
45	SHPed / Harga Produsen Pedesaan	108	108	100,00
46	SHPed / Harga Konsumen Pedesaan	72	72	100,00
47	HPG / Monitoring Harga Produsen Gabah	24	24	100,00
48	HPBG / Harga Beras di Penggilingan	70	70	100,00
49	HPK/Harga Produsen Barang Konstruksi	324	260	80,25
50	HPS/Harga Produsen Barang Non Konstruksi	360	290	80,56
51	HPJ/Harga Produsen Sektor Jasa	24	18	75,00
52	HPT/Harga Produsen Sektor Pertanian	12	12	100,00
53	HP (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)	8	8	100

No.	Nama Survei/Sensus	Target	Realisasi	Response Rate (%)
54	Survei Keuangan TK II - APBD 2	1	1	100,00
55	Survei Keuangan TK II - K2	1	1	100,00
56	Survei Keuangan TK Desa - K3	27	27	100,00
57	Survei Lembaga Keuangan - Koperasi	30	15	50,00
58	VHT-S / Survei Tingkat Penghunian Kamar	276	263	95,29
59	PJ II-5/Survei Panjang Jalan Raya	1	1	100,00
60	AJR II-2/Survei Angkutan Jalan Raya (Bus)	1	1	100,00
61	AJR II-3/Survei Angkutan Jalan Raya (Truck)	1	0	0,00
62	STKU / Survei Triwulanan Kegiatan Usaha	68	38	55,88
63	Survei Penyusunan Direktori Pasar & Pusat Perdagangan	1	1	100,00
64	Survei Peningkatan Kualitas Data Ekspor	3	3	100,00
65	Survei Konsumsi Bahan Pokok ~ PD	63	63	100,00
66	Survei Konsumsi Bahan Pokok ~ Listing	47	47	100,00
67	Survei Konsumsi Bahan Pokok ~ Sampel	220	220	100,00
68	PAW / Survei Perdagangan Antar Wilayah	16	16	100,00
69	Poldis / Survei Pola Distribusi Perdagangan	41	41	100,00
70	SPDT - NTP / Survei Penyempurnaan Diagram Timbang - Nilai Tukar Petani ~ Pencacahan	2.212	2.212	100,00
71	SPDT - NTP / Survei Penyempurnaan Diagram Timbang - Nilai Tukar Petani ~ Pengawasan / Pemeriksaan	2.212	2.212	100,00
72	SPDT - NTP / Survei Penyempurnaan Diagram Timbang - Nilai Tukar Petani ~ Editing/Coding	2.212	2.212	100,00
73	SPDT - NTP / Survei Penyempurnaan Diagram Timbang - Nilai Tukar Petani ~ Entry	2.212	2.212	100,00
74	Wisnus (Survei Wisatawan Nusantara)~ Listing	72	72	100,00
75	Wisnus (Survei Wisatawan Nusantara)~ Sampel	123	123	100,00
76	SE2016 – Lanjutan : Pendataan UMK UMB ~ Pendataan	20.696	19.987	96,57
77	SE2016 – Lanjutan : Pendataan UMK UMB ~ Pengawasan/Pemeriksaan	20.696	19.987	96,57
78	SE2016 – Lanjutan : Pendataan UMK UMB ~ Editing/Coding	20.696	19.987	96,57
79	Penyusunan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha	1	1	100
80	Penyusunan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Menurut Pengeluaran	1	1	100

No.	Nama Survei/Sensus	Target	Realisasi	Response Rate (%)
81	Penyusunan Statistik Daerah	1	1	100
82	Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)	1	1	100
83	Penyusunan Analisis Hasil Listing SE2016	1	1	100
84	Survei Tendensi Konsumen (STK)	520	520	100
85	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)	80	80	100
86	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPRT)	40	40	100
87	Pengolahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	760	760	100
88	Pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	1350	1350	100
89	Pengolahan Survei Penyusunan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT NTP)	1066	1066	100
90	Pengolahan DSU/DSL SE2016 – Lanjutan : Pendataan UMK UMB	20.541	20541	100
91	Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik	11	11	100
92	Pemutakhiran Peta Digital Wilayah Kerja Statistik	11	11	100
93	Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA)	1	1	100
94	Penyusunan Kecamatan Dalam Angka (KCDA)	31	31	100
95	Pemutakhiran Master File Desa (MFD)	280	280	100
96	Pendataan Survei Kebutuhan Data (SKD)	30	30	100
97	Pendataan Metadata	10	4	40

Lampiran 6. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2017

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
1	Kabupaten Bandung Dalam Angka 2017	Tahunan
2	Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2017	Tahunan
3	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017	Tahunan
4	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2012-2016	Tahunan
5	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Usaha 2012-2016	Tahunan
6	Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016	Tahunan
7	Potensi Ekonomi Kabupaten Bandung (Analisis Hasil Listing SE2016)	Tahunan
8	Kecamatan Ciwidey Dalam Angka 2017	Tahunan
9	Kecamatan Rancabali Dalam Angka 2017	Tahunan
10	Kecamatan Pasirjambu Dalam Angka 2017	Tahunan
11	Kecamatan Cimaung Dalam Angka 2017	Tahunan
12	Kecamatan Pangalengan Dalam Angka 2017	Tahunan
13	Kecamatan Kertasari Dalam Angka 2017	Tahunan
14	Kecamatan Pacet Dalam Angka 2017	Tahunan
15	Kecamatan Ibum Dalam Angka 2017	Tahunan
16	Kecamatan Paseh Dalam Angka 2017	Tahunan
17	Kecamatan Cikancung Dalam Angka 2017	Tahunan
18	Kecamatan Cicalengka Dalam Angka 2017	Tahunan
19	Kecamatan Nagreg Dalam Angka 2017	Tahunan
20	Kecamatan Rancaekek Dalam Angka 2017	Tahunan
21	Kecamatan Majalaya Dalam Angka 2017	Tahunan

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
22	Kecamatan Solokanjeruk Dalam Angka 2017	Tahunan
23	Kecamatan Ciparay Dalam Angka 2017	Tahunan
24	Kecamatan Baleendah Dalam Angka 2017	Tahunan
25	Kecamatan Arjasari Dalam Angka 2017	Tahunan
26	Kecamatan Banjaran Dalam Angka 2017	Tahunan
27	Kecamatan Cangkuang Dalam Angka 2017	Tahunan
28	Kecamatan Pameungpeuk Dalam Angka 2017	Tahunan
29	Kecamatan Katapang Dalam Angka 2017	Tahunan
30	Kecamatan Soreang Dalam Angka 2017	Tahunan
31	Kecamatan Kutawaringin Dalam Angka 2017	Tahunan
32	Kecamatan Margaasih Dalam Angka 2017	Tahunan
33	Kecamatan Margahayu Dalam Angka 2017	Tahunan
34	Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Angka 2017	Tahunan
35	Kecamatan Bojongsoang Dalam Angka 2017	Tahunan
36	Kecamatan Cileunyi Dalam Angka 2017	Tahunan
37	Kecamatan Cilengkrang Dalam Angka 2017	Tahunan
38	Kecamatan Cimenyan Dalam Angka 2017	Tahunan

DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**